



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SITTI HASBIA N. ZAENONG**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **669257**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 3.610.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 718 m²/257.75 m² di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m²/36 m² di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. Tanah Seluas 660 m² di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
4. Tanah Seluas 153 m² di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
5. Tanah Seluas 136 m² di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
6. Tanah Seluas 153 m² di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
7. Tanah Seluas 136 m² di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 18000 m²/180 m² di KAB / KOTA SIGI, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
9. Tanah Seluas 390 m² di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 93 m²/145 m² di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 400.000.000**



1. MOBIL, MITSUBUSHI PAJERO SPORT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	100.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	3.426.412.606
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	7.536.412.606
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	7.536.412.606

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.